

Analisis Perkembangan Penduduk Miskin, Karakteristik Kemiskinan dan Kedalaman Kemiskinan di Indonesia

Yuwarman Mansur^{1*}

^{1*} Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Abstrak. *Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan menyebabkan efek yang hampir sama di setiap negara. Kemiskinan juga merupakan fenomena sosial-ekonomi yang tidak hanya melintas batas agama, tetapi juga suku dan kebangsaan. Tujuan utama penelitian ini ialah untuk melakukan analisis deskriptif dalam melihat bagaimana serta seberapa besar perkembangan jumlah penduduk miskin, karakteristik kemiskinan, dan kedalaman kemiskinan di Indonesia, serta bagaimana dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data panel, dengan cara menghimpun data cross section seluruh provinsi yang ada di Indonesia sedangkan data time series yang digunakan dalam penelitian ini ialah data 5 tahun terakhir, yaitu mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kemiskinan relatif terdapat di provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Gorontalo. Dan kemiskinan absolut terdapat di provinsi Jawa timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sedangkan dilihat dari karakteristik kemiskinan, maka kemiskinan penduduk perdesaan lebih parah dibandingkan dengan penduduk perkotaan. dan apabila dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan, maka provinsi NTT, Maluku, dan Papua Barat memiliki kedalaman kemiskinan yang tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.*

Kata kunci: *Kemiskinan; Ketimpangan.*

Abstract. *Poverty is a very complex issue that affects all countries in much the same way. Poverty is a socio-economic phenomenon that transcends not only religious boundaries but also ethnic and national boundaries. The main purpose of this study is to conduct a descriptive analysis to clarify the number of poor people in Indonesia, the characteristics of poverty, how the depth of poverty has developed and to what extent, and the impact on the Indonesian economy. It is something to do. The data used in this study is panel data that collects cross-sectional data from all provinces in Indonesia, and the time-series data is from the past five years from 2017 to 2021. The analysis results of the "Survey Research" show that the number of poor people living in relative poverty in Indonesia exists in Papua, West Papua, NTT, Maluku, and Gorontalo provinces. Absolute poverty is widespread in East Java, Central Java, and West Java. On the other hand, looking at the characteristics of poverty, poverty among rural residents is more serious than among urban residents. Looking at the depth of poverty, the provinces of NTT, Maluku, and West Papua can be cited poverty levels are high here compared to other provinces in Indonesia.*

Keywords: *Poverty; Inequality.*

* Corresponding Author. Email: mansuryuwarman@gmail.com^{1*}.

Pendahuluan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan menyebabkan efek yang hampir sama di setiap negara. Kemiskinan juga merupakan fenomena sosial-ekonomi yang tidak hanya melintas batas agama, tetapi juga suku dan kebangsaan. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang tentu saja memiliki cita-cita dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat taraf hidup masyarakat sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu pemerintah berupaya agar pembangunan perekonomian Indonesia harus ditingkatkan dan dilaksanakan secara maksimal. Setiap pembangunan walaupun sekecil apa pun pasti memerlukan dana apalagi membangun perekonomian negara sebesar Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 275 juta jiwa atau tepatnya sebanyak 275.361,267 jiwa pada semester II tahun 2022. Berikut ini disajikan data perkembangan jumlahpenduduk miskin di Indonesia tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2017-2022

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	847	857	855	844	850
Sumatera Utara	1,365	859	1,485	1,452	1,389
Sumatera Selatan	1,109	1,092	1,128	1,098	1,086
Lampung	1,148	1,142	1,131	1,54	1,107
Jawa Barat	4,340	4,282	4,46	4,47	3,97
Jawa Tengah	4,718	4,670	4,541	4,499	4,323
Jawa Timur	4,818	4,767	4,782	4,670	4,511
Nusa Tenggara	497	992	1,159	1,149	1,142
Sulawesi Selatan	822	835	830	801	819
Papua	2,074	1,149	878	912	903

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022.

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas, dapat

diketahui bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan, yakni sebesar 6,54% pada tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya, dan sebesar 3,11% pada tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan yakni sebesar 5,06% pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya, dan sebesar 4,26% pada tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya. Namun berdasarkan data BPS pada akhir Nopember 2022 yang lalu jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan kembali sebesar 5,02% dibanding tahun 2021.

Tabel 2. Provinsi yang memiliki Jumlah Penduduk Miskin terbesar di Indonesia tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Kenaikan/ Penurunan Jumlah	Prosentase
2017	27.771.223	-	-
2018	25.954.237	(1.816.985)	(6,54)
2019	25.147.819	(806.418)	(3,11)
2020	26.421.332	1.273.513	5,06
2021	27.546.316	1.124.984	4,26
2022	26.164.481*	1.381.835	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan tabel 2 diatas, angka kemiskinan tertinggi di sumbangkan oleh Provinsi Jawa Timur. Menurut data BPS, kurang lebih 4.511.000 juta jiwa penduduk miskin terdapat di Jawa Timur. Berdasarkan laporan BPS, Jawa Timur adalah Provinsi yang menyumbangkan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, yaitu sekitar 4,5 juta jiwa. Salah satu acuan tingkat kemiskinan di Indonesia yang sampai sekarang tidak dapat diatasi adalah Ketidakmerataan Penduduk, Tingkat Infrastruktur, Tingkat pendidikan dan Kesehatan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia yang ada di indonesia.

Ketidakmerataan Penduduk di Indonesia

Faktanya ketidakmerataanya penduduk dapat di lihat di Pulau Jawa. Pulau jawa merupakan pulau yang paling banyak dijadikan tujuan migrasi (perpindahan penduduk). Padahal, dari keseluruhan luas wilayah Indonesia pulau jawa hanya memiliki luas 6,8% ternyata dihuni oleh penduduk sebesar 57,5% penduduk Indonesia.

Jika dibandingkan dengan Pulau Sumatera yang memiliki luas sebesar 25,2% dari luas wilayah Indonesia, pulau Sumatera hanya di huni oleh 21,3% penduduk. Maka dapat dikatakan ketidak merataannya penduduk di Indonesia tidaklah seimbang. Salah satu yang menjadi alasan kuat dalam pertimbangan seseorang dengan bermigrasi ke Pulau Jawa merupakan Infrastruktur. Dimana Infrastruktur merupakan faktor utama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan para investor lebih tertarik berinvestasi pada daerah-daerah yang memiliki pembangunan infrastruktur yang memadai sehingga dapat mengembangkan potensi daerah tersebut secara maksimal.

Infrastruktur di Indonesia

Dalam Global Competitiveness Report 2018-2019, yang disusun oleh lembaga World Economics forum (WEF), Indonesia menempati urutan ke 71 dari 100 negara dengan indeks 66,8. Infrastruktur sebuah negara dibangun dalam berbagai bentuk mengikuti kebutuhan masyarakat. Sektor-sektor yang paling signifikan membutuhkan infrastruktur agar bisa beroperasi efektif dan efisien adalah transportasi, energi, komunikasi, air dan pertahanan. Sementara itu infrastruktur yang memiliki efek langsung terhadap kehidupan warga adalah transportasi. Negara-negara yang dilengkapi dengan fasilitas jalan, kereta api dan pelabuhan akan memiliki posisi yang lebih baik untuk memperoleh keuntungan dari perdagangannya di dalam negeri dan Internasional. Infrastruktur global terdiri dari jaringan fisik dan fasilitas yang mendasar bagi berfungsinya negara industri modern. Pada tahun 2018, Singapura berada di peringkat nomor satu dalam hal kualitas infrastruktur. dalam hal pembangunan infrastruktur. Dengan peringkat yang bertahan di standar rata-rata, namun tetap menyebabkan beberapa masalah besar dalam perekonomian Indonesia.

Kesehatan di Indonesia

Kesehatan merupakan investasi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kependudukan lainnya seperti kemiskinan karena suatu negara tanpa penduduk yang sehat tidak akan mungkin dapat

membangun negaranya sendiri. Pelayanan kesehatan merupakan faktor penting untuk meningkatkan taraf hidup dari penduduk itu sendiri. Namun nyatanya hingga saat ini pelayanan kesehatan di Indonesia belum bisa dikatakan cukup memadai untuk seluruh penduduk Indonesia terutama untuk penduduk yang tinggal di daerah timur Indonesia seperti Maluku, NTT, NTB dan Papua dengan tingkat gizi buruk diatas 40%. Memang hal tersebut tidak bisa langsung kita buat menjadi acuan dalam penentuan status pelayanan kesehatan di Indonesia namun hal itu dapat menjadi tamparan keras bagi bangsa kita karena betapa tidak meratanya pelayanan kesehatan di Indonesia.

Pendidikan di Indonesia

Di Indonesia dunia pendidikan masih memiliki beberapa kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan diantaranya adalah keterbatasan akses pada pendidikan diantaranya adalah keterbatasan akses pada pendidikan, jumlah guru yang belum merata, serta kualitas guru itu sendiri dinilai masih kurang. Terbatasnya akses pendidikan di Indonesia, terlebih lagi di daerah berujung kepada meningkatnya arus urbanisasi untuk mendapatkan akses ilmu yang lebih baik di perkotaan. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad saat ini banyak sekolah dasar (SD) di Indonesia kekurangan tenaga guru dengan jumlah yang diperkirakan mencapai 112 ribu guru. Untuk mengatasinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam hal distribusi guru di daerah-daerah supaya lebih merata.

Tinjauan Literatur

Teori Pembangunan Ekonomi-Schumpeter

Menurut Joseph Schumpeter pembangunan ekonomi adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus (discontinuous) pada saluran-saluran arus sirkuler yaitu merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya (Jhingan 2000).

Teori Pembangunan Ekonomi-Sadono Sukirno

Menurut Sadono Sukirno mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per-kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui srangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang (Sadono Sukirno 1985).

Teori Pembangunan Ekonomi-Sumitro Djojohadikusumo

Menurut Sumitro Djojohadikusumo pembangunan ekonomi adalah suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan ekonomi mauoun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan (Sumitro Djojohadikusumo:1994)

Teori Pembangunan Ekonomi-Todaro

Menurut Todaro pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Teori Pembangunan Ekonomi-Klasik (Adam Smith)

Adam smith mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam buku yang berjudul *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations* tahun 1776 ia menemukan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang yang sistematis. Inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dibagi menjadi dua aspek utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.

Teori Pembangunan Ekonomi-Harrod-Domar

Menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi supaya perekonomian dapat mencapai

pertumbuhan yang teguh (steady growth) dalam jangka panjang. Asumsi yang digunakan oleh Harrod- Domar dalam teori pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh beberapa hal-hal berikut:

- 1) Tahap awal perekonomian telah mencapai tingkat full employment.
- 2) Perekonomian terdiri atas sektor rumah tangga (konsumen) dan sektor perusahaan (produsen).
- 3) Fungsi tabungan dimulai dari titik nol, sehingga besarnya tabungan proposional dengan pendapatan.
- 4) Hasrat menabung batas (Marginal propensity to save) besarnya tetap.

Teori Pembangunan Ekonomi – Rostow

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, melalui tahapan:

- 1) Masyarakat tradisional, yaitu suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di dalam fungsi produksi yang terbatas.
- 2) Prasyarat lepas landas, yaitu suatu masa transisi di mana suatu masyarakat mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (selfsustained growth).
- 3) Lepas landas, adalah suatu masa di mana berlakunya perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbentuknya pasar baru.
- 4) Tahap kematangan, adalah suatu masa di mana suatu masyarakat secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alam.
- 5) Masyarakat berkonsumsi tinggi, yaitu suatu masyarakat di mana perhatiannya lebih menekankan pada masalah konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi pada masalah produksi.

Teori Pembangunan Ekonomi – Kuznets

Menurut Kuznets (Todaro, 2011) pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada masyarakat. Kenaikan kapasitas itu sendiri

ditentukan dengan adanya kemajuan teknologi, memperhitungkan adanya pertambahan penduduk, secara institusi dan dasar terhadap berbagai tuntutan kondisi yang ada dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Teori Pembangunan Ekonomi – Kuznets

Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Solow dan Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi (eksogen), dan besarnya output yang saling berinteraksi. Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L).

Teori Pembangunan Ekonomi – David Ricardo

Garis besar pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith yaitu bahwa proses pertumbuhan masih pada perpaduan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Selain itu Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (sumber daya alam) tidak bisa bertambah sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat.

Teori Kemiskinan

Kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikategorikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi itu rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan dapat dibagi secara umum dan sederhana antara lain :

1) Kemiskinan Absolut

Individu atau kelompok yang termasuk dalam ukuran kemiskinan absolut apabila memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Ukuran ini digunakan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk melangsungkan hidup.

2) Kemiskinan Relatif

Individu atau kelompok yang termasuk dalam ukuran kemiskinan relatif apabila kebutuhan dasarnya dalam ukuran kemiskinan relatif apabila kebutuhan dasarnya lebih terpenuhi, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan ukuran ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan apabila tingkat hidup masyarakat berubah, sehingga pengukuran kemiskinan relatif bersifat dinamis atau akan selalu ada.

3) Kemiskinan Kultural

Individu atau kelompok yang termasuk dalam ukuran kemiskinan kultural apabila individu atau kelompok tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain maupun ada peluang, dengan kata lain individu atau kelompok tersebut miskin karena sikapnya sendiri, yaitu pemalas dan tidak ada usaha untuk memperbaiki kehidupannya ke kondisi yang lebih baik.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis jadikan rujukan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai penelitian dengan fokus tema yang relevan dengan penelitian ini yaitu kemiskinan. Beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

- 1) Umar Chapra The Journal of Socio-Economics, (2006) judul penelitian Ibn Khaldun's theory of development: Does it help explain the low performance of the present-day Muslim world ? menggunakan model penelitian $G = f(S, N, W, j \text{ dan } g)$, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan atau penurunan perekonomian suatu masyarakat tidak tergantung pada satu faktor, tetapi terdapat interaksi dari faktor moral, sosial, ekonomi, politik dan sejarah selama jangka waktu yang panjang.
- 2) Omy Hanafiah Thesis, Universitas

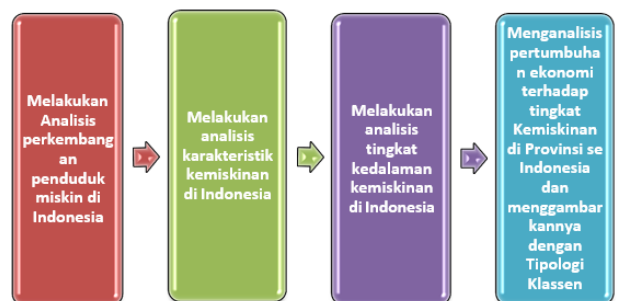
Indonesia, (2008), judul penelitian Pengaruh Variabel- Variabel Dalam Model Dinamika Ibnu Khaldun Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Beberapa Negara Muslim, menggunakan variabel-variabel Kekayaan (X1), pembangunan dan keadilan (X2), Negara (X3), Manusia (X4), Syariah (X5). Hasil penelitian Variabel-variabel model dinamika Ibnu Khaldun berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Negara-negara muslim. Dimana Negara (G), Masyarakat (N), kekayaan (W), berpengaruh secara negatif, sedangkan variabel pembangunan (g) dan keadilan (j) mempunyai pengaruh secara positif. Namun variabel syariah (S) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Negara-negara muslim.

- 3) Dian Faisal Putra dan Indra Jurnal Ilmu ekonomi Volume 5 (1), P-ISSN: 2087-2046; E-ISSN: 2476 - 9223, Judul penelitian Determinant Of The poverty In the Moslem Countries: Ibnu Khaldun Development Model. Variabel yang digunakan adalah Kekayaan Negara (X1),Pengeluaran Pemerintah (X2), SumberDaya Manusia (X3), Syariah (X4), Pembangunan (X5), Keadilan (X6). Hasil penelitian ini GDP per kapita berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Negara OKI. Dan juga ditemukan bahwa pengangguran (sebagai variabel control) berperan dalam memicu kemiskinan di Negara OKI. Sementara itu, pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, Gini rasio, Indeks pembangunan manusia, dan indeks korupsi tidak signifikan terhadap kemiskinan
- 4) Misdawita dan A. Arini Putri SariJurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 2, Tahun 2013, Judul Penelitian Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah di BidangPendidikan, Kesehatan, dan Pengeluaran subsidi terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel penelitian mencakup Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (X1) Pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan (X2) dan Pengeluaran pemerintah dalam pemberian

subsidi (X3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan memiliki dampak yang negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan Pengeluaran pemerintah untuk subsidi memiliki dampak yang negatif namun tidak signifikan

- 5) Carolina Margaretha dan Sartika Djamaluddin, Analisis karakteristik Rumah Tangga Miskin antar Wilayah di Indonesia, Variabel yang digunakan adalah Ukuran Rumah Tangga, Jumlah Balita, Rasio ART berkerja, Luas Lantai Perkapita, Jenis Lantai Terluas, Jenis Bahan Bakar Utama, Jenis Penerangan Utama, Jenis Sumber air Utama. Hasil penelitian Didapati bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan pada variabel dependen di semua wilayah di Indonesia
- 6) Samsubar Saleh (2002),Faktor-faktor penentu tingkat kemiskinan regional di Indonesia, menggunakan variabel-variabel YPC,tingkat pendapatan perkapita per provinsi IMP, pengeluaran pemerintah untuk investasi sumberdaya manusia per kapita per provinsi, IFP, pengeluaran pemerintah untuk investasi fisik per kapita per provinsi, HH, angka harapan hidup, MH, angka melek huruf persentase dari total penduduk, RS, rata-rata lama sekolah, HDI, indeks pembangunan manusia dan RG.

Kerangka Konseptual.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Metodologi Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif

dengan menganalisis hubungan antar variabel. Data yang disajikan adalah panel data yaitu dimana penelitian menggunakan data cross section data yang diteliti dari satu dan time series waktu yang dihimpun pada tahun yang berbeda secara bersamaan. Data yang akan diteliti adalah di Indonesia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Model analisis yang digunakan untuk melihat Karakteristik dari sisi Jumlah penduduk miskin menurut Provinsi, Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia, tingkat ketimpangan kemiskinan di Indonesia dan dari sisi Indeks kedalaman kemiskinan di Indonesia. Metode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Tipologi Klassen (Klassen Typology).

Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan variabel yang digunakan untuk memuat suatu sifat-sifat dari variabel sehingga dapat digunakan untuk penelitian.

Tabel 3. Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkisanambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.	www.bps.go.id
Ketimpangan Pendapatan (KP)	Kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata.	www.bps.go.id
Tingkat Kemiskinan (TK)	Keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, dan kesehatan.	www.bps.go.id
Jumlah Penduduk Miskin (JP)	Kondisi rata-rata jumlah penduuduk miskin yang berada dalam garis	www.bps.go.id

	kemiskinan dan dapat dikatakan masuk dalam golongan orang-orang yang tidak mampu memenuhi kehidupan sehari-hari.
Kedalaman Kemiskinan (KK)	Kondisi rata-rata indeks kedalaman kemiskinan penduduk miskin di Indonesia.

Waktu penelitian

Waktu penelitian direncanakan selama 5 bulan yaitu bulan Juni 2022 sampai dengan Nopember 2022.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari publikasi resmi yang berasal dari, Badan Pusat Statistik, website yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode Dokumentasi (*Documentation Research*). Metode dokumentasi adalah pengambilan data melalui dokumen-dokumen. Baik dari bahan – bahan kepustakaan berupa tulisan-tulisan ilmiah seperti artikel atau jurnal-jurnal ilmiah baik secara online maupun offline serta laporan-laporan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

Tahapan Analisis Analisis Deskriptif

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data analisis deskritif. Analisis deskritif merupakan suatu metode abalisis sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik dan dengan tujuam untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil peneliti.

Analisis Perkembangan Penduduk Miskin di Indonesia

Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus mengalami fluktuasi tiap tahunnya dari tahun 2017-2021.

Melakukan Analisis Karakteristik Kemiskinan di Indonesia

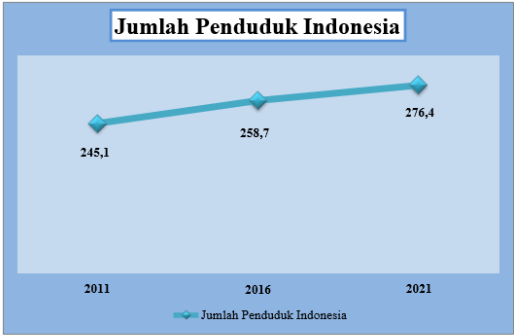
Salah satu karakteristik kemiskinan di Indonesia adalah perbedaan yang begitu besar antara nilai kemiskinan relatif dan nilai kemiskinan absolut dalam hubungan dengan lokasi geografis, usia, dan wilayah (perdesaan/perkotaan).

Analisis Tipologi Klassen

Alat analisis klassen Typology (Tipologi Klassen) digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi yang berbeda

- 1) Menganalisis hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi se-Indonesia dan menggambarkannya dengan Tipologi Klassen.
- 2) Menganalisis hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi se-Indonesia dan menggambarkannya dengan Tipologi Klassen.
- 3) Melakukan Analisis tingkat kedalaman kemiskinan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 2. Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2011, 2016 dan 2021

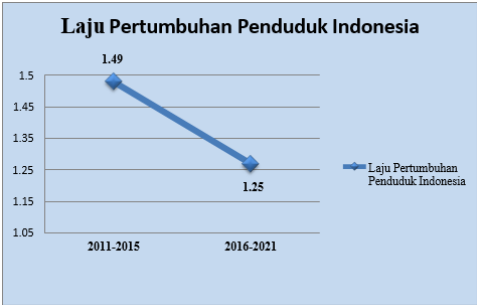
Dalam gambar 2, jumlah penduduk Indonesia selama 10 tahun meningkat disetiap tahunnya. Untuk dapat melihat penduduk indonesia menurut provinsi, maka peneliti menyajikan tabel indonesia menurut Provinsi sebagai berikut:

Jumlah penduduk Indonesia Tahun 1995-2000-2016			
Jumlah Penduduk			
Provinsi	2011	2016	2021
Aceh	4.619	5.094,5	5.334
Sumut	13.220,9	14.136,8	14.936
Sumbar	4.933,1	5.272,5	5.580
Riau	5.726,2	6.478,4	6.494
Jambi	3.167,6	3.445,9	3.585
Sumsel	7.598,5	8.174,1	8.551
Bengkulu	1.753	1.900,7	2.033
Lampung	7.735,9	8.210,3	9.082
Bangka B	1.258,2	1.393,1	1.473
K. Riau	1.748,8	2.045,3	2.118
DKI Jakarta	9.752	10.265,3	10.610
Jawa Barat	43.938,8	47.365,8	48.782
Jawa Tengah	32.725	34.964,4	36.743
Yogyakarta	3.510	3.618,5	3.713
Jawa Timur	37.840,7	38.041,4	40.879
Banten	10.943	11.157,2	12.610
Bali	3.957,6	4.102,4	4.363
NTB	4.581,8	4.724,8	5.390
NTT	4.788,6		5.388
KalBar	4.488,9	4.895,9	5.471
KalTeng	3.714,3	2.212,3	2.702
KalSel	3.714	3.926,8	4.123
KalTim	3.673,9	3.753,2	3.808
SulUt	2.305,9	2.570,5	2.639
SulTeng	2.692,8	2.695,9	2.702
SulSel	8.156,1	8.734,6	9.140
SulTengg	2.294,4	2.432,4	2.659
Gorontalo	1.062,6	1.090,7	1.181
SulBar	1.187,5	1.258,3	1.437
Maluku	1.570,7	1.733,8	1.863
MalUt	1.067,2	1.138,6	1.299
PapBar	786	1.003,3	1.157
Papua	2.915,3	3.233,1	4.355

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 3. Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2011-2021

Dalam tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terpadat dan terbanyak di provinsi Jawa Barat. Penduduk di Provinsi Jawa Barat di tahun 2021 sebanyak 48.782.094 jiwa. Provinsi yang berada di urutan kedua sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Jawa Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 40.479.300 jiwa. Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 36.743.100 jiwa ini berada di urutan ketiga sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Indonesia. Selain jumlah penduduk indonesia laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduudk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah mempediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan penduduk, geometrik menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk sama setiap tahunnya. Untuk dapat melihat laju pertumbuhan penduduk di Indonesia maka peneliti mensajikannya dalam bentuk gambar sebagai berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 4. Laju Pertumbuhan Penduduk per-Tahun 2011-2021

Dari gambar 4 diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia mengalami peningkatan yang positif. Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2016- 2021 berjumlah sebanyak 1.25%. Berdasarkan data selama periode 2011 – 2016 laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 3,06%, disusul oleh Provinsi Riau diurutan kedua sebesar 2,59%, dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 2,58% Sedangkan pada periode tahun 2016 – 2021 laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Utara yakni sebesar 3,84%, disusul oleh Provinsi Kepulauan Riau diurutan kedua yakni sebesar 2,90%, dan diurutan ketiga Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 2,55%. Selama periode tahun 2011 – 2021 Provinsi Kepulauan Riau memiliki laju pertumbuhan tertinggi di Pulau Sumatera, dan tertinggi kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan Utara.

Analisis perkembangan penduduk miskin di Indonesia tahun 2017 – 2021.

Laju Pertumbuhan Penduduk per-Tahun		
Provinsi	2011-2016	2016-2021
Aceh	2,01	1,93
Sumut	1,30	1,24
SumBar	1,29	1,25
Riau	2,59	2,52
Jambi	1,80	1,72
SumSel	1,46	1,39
Bengkulu	1,69	1,63
Lampung	1,21	1,13
Kep.Bangka.B	2,20	2,14
Kep.Riau	3,06	2,90
Jakarta	1,07	1,02
Jawa Barat	1,54	1,48
Jawa Tengah	0,79	0,76
Yogyakarta	1,18	1,15
Jawa Timur	0,66	0,62
Banten	2,23	2,14
Bali	1,21	1,17
NTB	1,36	1,29
NTT	1,69	1,66
KalBar	1,63	1,56
KalTeng	2,33	2,26
KalSel	1,81	1,71
KalTim	2,58	2,24
KalUt	-	3,84
SulUt	1,13	1,07
SulTeng	1,67	1,61
SulSel	1,10	1,05
SulTenggara	2,16	2,10
Gorontalo	1,62	1,58
SulBar	1,93	1,91
Maluku	1,79	1,75
Maluku Utara	2,16	2,08
Papua Barat	1,95	2,55
Papua	1,36	1,88

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 6. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2017-2021

Untuk dapat melihat tingkat kemiskinan di Indonesia selama 5 tahun, maka kita dapat melihat jumlah penduduk miskin di Indonesia dan persentase penduduk miskin di indonesia dalam bentuk gambar sebagai berikut :

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2013-2017										
Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi tahun 2013-2017									
	2017		2018		2019		2020			2021
	Sem1	Sem2	Sem1	Sem2	Sem1	Sem2	Sem1	Sem2	Sem1	Sem2
Aceh	840,71	855,71	881,26	837,42	851,59	859,41	848,44	841,31	872,61	829,8
Sumut	1.339	1.390	1.286	1.360	1.463	1.508	1.455	1.452	1.453	1.326
Sumbar	407,47	380,63	379,20	354,74	379,61	349,53	371,56	376,51	364,51	359,9
Riau	469,28	522,53	499,88	498,28	531,39	562,92	515,40	501,59	514,02	496,3
Jambi	266,15	281,57	263,80	281,75	300,71	311,56	289,80	290,81	286,55	278,6
SumSel	1.110	1.108	1.100	1.085	1.145	1.112	1.101	1.096	1.086	1.086
Bengkulu	327,35	320,41	320,95	316,50	334,07	322,83	325,61	325,60	316,98	302,6
Lampung	1.163	1.134	1.142	1.143	1.163	1.100	1.169	1.139	1.131	1.083
Kep.Bangka	69,22	70,90	71,64	67,23	74,09	66,62	72,76	71,07	74,09	76,20
Kep.Riau	126,66	125,02	127,80	124,17	122,40	114,83	120,41	119,14	125,87	125,4
Jakarta	354,19	375,70	393,98	412,79	395,92	368,07	354,30	385,84	389,69	393,1
Jawa Barat	4.297	4.382	4.327	4.238	4.435	4.485	4.224	4.168	4.168	3.774
Jawa Tengah	4.732	4.704	4.836	4.561	4.577	4.505	4.506	4.493	4.450	4.197
Yogyakarta	550,20	535,15	544,87	532,59	550,23	455,56	494,94	455,83	455,83	466,3
Jawa Timur	4.771	4.865	4.786	4.748	4.789	4.775	4.703	4.638	4.617	4.405
Banten	656,25	682,71	622,84	649,19	702,40	690,67	658,11	657,74	675,04	699,8
Bali	162,52	156,53	185,20	195,95	196,71	215,79	178,18	174,94	180,13	176,4
NTB	830,85	802,45	820,82	816,62	829,89	802,29	804,44	786,58	793,78	748,1
NTT	993,56	1.009	994,67	991,85	1.159	1.160	1.149	1.150	1.150	1.134
KalBar	369,01	394,17	401,51	381,92	383,70	405,51	381,35	390,32	387,43	385,8
KalTeng	136,95	145,36	146,32	145,82	147,70	145,13	143,49	137,46	139,16	137,8

Gambar 7. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2013-2017

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret tahun 2021 mencapai 27,77% dan di September 2021 27,55%. Dengan jumlah penduduk tersebut merupakan angkayang tertinggi selama 5 tahun terakhir seperti yang disajikan di dalam tabel berikut untuk dapat melihat Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi tahun 2017-2021 maka peneliti menyajikan datanya sebagaimana tercantum pada tabel dibawah sebagai berikut :



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 8. Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2019-2021

Jika dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin menurut provinsi terbesar pertama terdapat di Provinsi Jawa Timur berjumlah sebanyak 4.405 juta jiwa dan provinsi kedua terdapat di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk miskin sebanya 4.197 juta jiwa, dan Provinsi ketiga terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 3.774. Untuk dapat melihat perkembangan penduduk miskin di Indonesia maka kita dapat melihat jumlah penduduk miskin ditahun 2019-2021 yang disajikan dalam gambar sebagai berikut :

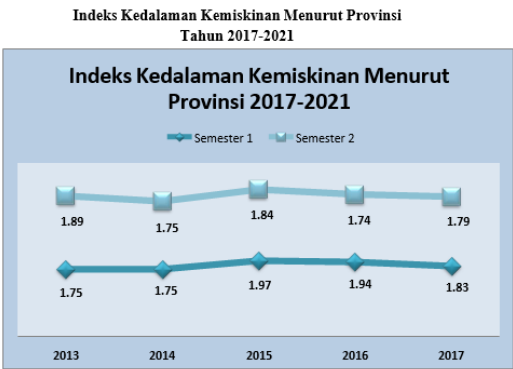
Tahun	Perkotaan (Semester 1)	Perdesaan (Semester 1)	Perkotaan (Semester 2)	Perdesaan (Semester 2)
2017	10.325,55	17.741,05	10.634,47	17.919,46
2018	10.507,20	17.772,81	10.356,69	17.371,09
2019	10.652,64	17.940,15	10.619,86	17.893,71
2020	10.339,77	17.665,62	10.485,64	17.278,68
2021	10.673,83	17.097,39	10.272,55	16.310,44

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 9. Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2017-2021

Jumlah penduduk miskin dan Persentase penduduk miskin pada tabel diatas mengalami fluktuasi tiap tahunnya dari tahun 2019-2021. Persentase penduduk miskin di tahun 2020 sebanyak 10,86% pada semester 1 yaitu pada Maret 2020 dan di semester 2 yaitu pada September 2020 persentase kemiskinan berkurang sebanyak 0,79%. Dan di Maret 2021 persentase kemiskinan sebanyak 10,64% dan di September 2021 persentase penduduk miskin sebanyak 10,12%. Berarti selama kurun waktu 1 tahun jumlah persentase penduduk miskin berkurang. Dapat disimpulkan bahwa disetiap tahunnya penduduk Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan hidup. Badan pusat

statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2021 menurun dibandingkan September 2020 dari 10,70% menjadi 10,64%. Namun bila berdasarkan jumlah penduduk, BPS mencatat terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin dari 27,76 juta jiwa menjadi 27,77 juta jiwa. Ini merupakan pencapaian mengembirakan karena persentase penduduk miskin pada bulan September 2021 turun menjadi 10,12%. Ada berbagai faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret-September adalah inflasi umum yang relatif rendah yaitu 1,45%. Selain itu, rata-rata upah nominal buruh tani per-buruh tani pada september 2017 naik sebesar 1,5% dibandingkan Maret 2021, yaitu dari Rp.37.318 menjadi Rp. 37.711. dalam periode yang sama, upah nominal buruh bangunan perhari pada September naik sebesar 0,78% dibandingkan maret 2021 yaitu dari Rp. 83,724 menjadi Rp. 84.378. Penduduk miskin di Indonesia berada di dua daerah antara lain di daerah perkotaan dan perdesaan, untuk dapat melihat jumlah penduduk miskin menurut Provinsi dalam bentuk Perdesaan dan Perkotaan yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 10. Indeks Kedalaman Kemiskinan menurut Provinsi Tahun 2017-2021

Analisis Karakteristik Kemiskinan di Indonesia

Jumlah penduduk miskin di Indonsesia dilihat berdasarkan perkotaan / perdesaan terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dari tahun 2017-2021 menunjukkan hasil positif karena jumlah penduduk miskin dalam Tahun 2021 akhir menunjukkan hasil yang positif atau berkurangnya jumlah penduduk miskin yang berada di perdesaan. Namun dapat dilihat dari tabel diatas, tingkat kemiskinan yang dapat

dikatakan tinggi berada di daerah Indonesia bagian perdesaan dengan jumlah penduduk miskin hampir mencapai 17,09% di Maret 2021 dan pada September 2021 dengan jumlah penduduk miskin perdesaan sebanyak 16.310%. Dapat dikatakan jumlah penduduk miskin yang berada di pedesaan mengalami jumlah yang paling besar dikarenakan jauh dari perhatiannya pihak pemerintah, transportasi dan infrastruktur antara kota dan desa cukup dikatakan tidak memadai sehingga barang-barang yang dibawa dari kota kedesa mengalami peningkatan harga yang sangat mahal.

Analisis Tingkat Kedalaman Kemiskinan di Indonesia

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang terkait dengan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Namun, pada kenyataan meski jumlah penduduk miskin menurun, indeks kedalaman dan keparahan justru meningkat. Berikut Indeks Kedalam Kemiskinan di Indonesia yang disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut :

Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi Tahun 2017-2021										
Provinsi	Perkotaan+perdesaan									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Sem1	Sem2	Sem1	Sem2	Sem1	Sem2	Sem1	Sem2	Sem1	Sem2
Aceh	3.13	3.20	2.91	3.14	3.10	3.11	3.48	3.06	2.98	2.92
Sumut	1.54	1.72	1.47	1.71	1.65	1.89	1.77	1.96	1.71	1.50
SumBar	1.01	1.27	0.94	0.75	0.98	1.26	1.10	1.12	1	0.99
Riau	1.18	1.18	1.01	1.20	1.38	1.45	1.36	1.36	1.32	0.96
Jambi	0.99	1.12	1.05	1.12	1.42	1.60	1.47	1.42	1.28	0.99
Sumsel	2.08	2.49	2.25	2.41	2.46	1.88	2.02	1.96	2.24	2.40
Bengkulu	3	3.24	2.78	2.85	3.48	3.63	3.14	2.79	2.85	2.76
Lampung	2.27	2.23	2.23	2.30	2.36	2.36	2.63	1.92	2.16	2.11
Kep.B.Belitung	0.54	0.62	0.73	0.60	0.67	0.90	0.67	0.75	0.49	0.56
Kep.Riau	0.69	1.02	0.94	0.74	0.97	0.86	0.89	0.71	0.97	1.18
Jakarta	0.63	0.39	0.39	0.60	0.52	0.27	0.46	0.43	0.49	0.61
Jawa Barat	1.32	1.65	1.52	1.39	1.63	1.67	1.49	1.28	1.45	1.39
Jawa Tengah	2.21	2.37	2.25	2.09	2.44	2.17	2.37	2.12	2.21	2.11
Vogyakarta	2.40	2.13	2.19	2.35	2.93	2.32	2.30	1.75	2.19	2.09
Jawa Timur	1.84	2.07	1.85	1.86	2.06	2.13	1.99	1.95	1.87	2.09
Banten	0.70	1.02	0.83	0.79	0.94	0.90	0.80	0.76	0.86	0.78
Bali	0.47	0.70	0.42	0.86	0.66	1.13	0.51	0.53	0.68	0.55
NTB	2.74	2.72	2.56	2.92	3.25	2.72	3	2.63	3.13	2.63
NTT	3.39	3.04	3.34	3.25	4.06	4.62	4.69	3.83	4.34	4.16
KalBar	1.19	1.30	0.98	1.26	1.29	1.09	1.30	1.13	1.23	1.02
KalTeng	0.86	0.61	0.75	0.97	0.89	1.02	0.86	0.65	0.84	0.84

KalSel	0.53	1.25	0.63	0.65	0.74	0.98	0.71	0.69	0.72	0.74
KalTim	0.83	1.25	1.08	0.79	0.90	0.69	1.04	0.81	0.89	0.87
KalUt	-	-	-	-	0.79	0.70	0.78	0.88	1.21	1.32
SulUt	1.18	1.16	1.21	1.28	1.34	1.54	1.53	1.38	1.37	1.30
SulTeng	3.09	2.28	2.18	2.11	2.52	2.37	2.72	2.28	2.55	2.80
SulSel	1.67	1.65	1.56	1.41	1.69	1.58	1.83	1.53	1.72	1.92
SulTenggara	2.12	1.83	1.99	2.09	2.64	2.05	2.76	1.98	1.87	2.09
Gorontalo	3.18	3.22	3.29	3.13	3.97	3.04	4.12	2.79	3.68	3.31
SulBar	1.89	1.30	1.44	1.94	1.93	1.54	1.95	1.85	1.88	1.81
Maluku	3.88	3.52	3.80	4.11	3.52	4.79	3.63	3.76	3.50	3.41
Maluku Utara	0.78	0.89	1.10	1.16	0.70	1.15	0.73	0.92	0.81	0.81
Papua Barat	6.35	5.89	6.20	5.92	6.24	5.29	7.21	6.28	6.74	7.41
Papua	6.89	6.56	6.84	6.42	8.82	0.85	9.37	7.44	7.50	1.79

Gambar 11. Indeks Kemiskinan menurut Provinsi Tahun 2017-2021

Jika dilihat dari gambar 11 diatas, dapat dilihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan indonesia mengalami penurunan. Pada Maret 2021 indeks kedalaman kemiskinan sebanyak 1,83% dan di September 2021 jumlah kedalaman kemiskinan di Indonesia sebanyak 1,79%. Dari gambar 11 diatas dapat lihat bahwa tingkat indeks kedalaman kemiskinand di Indonesia tertinggi berada di provinsi NTT, Maluku, dan Papua Barat. Di papuabareat tahun 2021 jumlah penduduk miskin (penduduk yang berda di garis kemiskinan) mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat mencatat orang miskin di Provinsi tersebut pada bulan Maret 2021 naik 22,38 ribu jiwa (25,10) dan secara persentase, mengalami kenaikan sebesar 0,22%.

Indeks kemiskinan maret 2021 sebesar 6,74%. Angka ini mengalami kenaikan dari September 2020 (6,28). Kenaikan indeks kedalaman kemikinan sebesar 0,47% mengindikasikan pendapatan perkapita dari penduduk miskin tidak meningkat signifikan dan tidak diimbangin dengan laju kenaikan garis kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa gap pendapatahn perkapita antar sesama penduduk miskin semakin melebar.

Analisis Tipologi Klassen

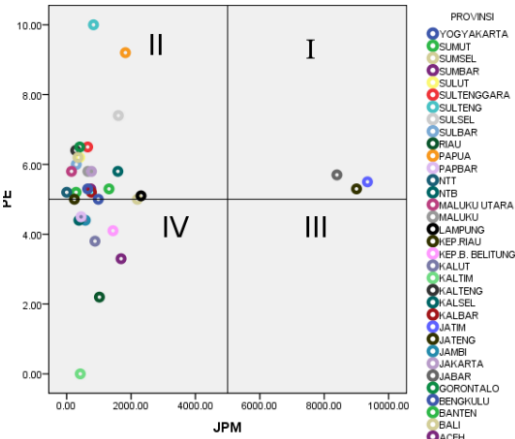
Dari hasil analisis Tipologi Klassen pada gambar 12 dengan menggunakan indikator Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Indonesia, maka dapat diporeh hasil sebagai berikut dengan klasifikasi dalam 4 kuadrat yaitu:

- 1) Kuadrat I (daerah yang maju dan tumbuh dengan pesat) Daerah yang termasuk dalam

kategori kuadrat satu yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tiga Provinsi tersebut memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin lebih tinggi dari tingkat Provinsi lainnya. Jawa Timur memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% dan jumlah penduduk miskin sebesar 9.341,83 juta jiwa. Jawa Tengah memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 dan jumlah penduduk miskin sebesar 9.000,64 juta jiwa. Dan yang terakhir provinsi Jawa Barat dengan memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,7 dan dengan jumlah penduduk miskin sebesar 8.392,44 juta jiwa. Tiga provinsi yang termasuk dalam kategori daerah kuadrat satu ini merupakan daerah yang memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi terhadap pusat pemerintah, memiliki fasilitas umum yang memadai dalam berbagai seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta sarana dan prasarana dalam menunjang kelancarnya jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.

- 2) Kuadrat II (daerah cepat maju tapi tertekan) Pada kuadrat II terdapat provinsi Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua, NTT, NTB, Maluku Utara, Maluku, Lampung, Kep. Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jakarta, Gorontalo, Bengkulu, Banten, Bali. Ciri-ciri umum daerah yang termasuk dalam kuadrat ini adalah memiliki potensi yang dapat menjadi nilai tambah dalam memperoleh pendapatan per kapita wilayah dengan tingkat aksesibilitas cukup tinggi yang ditawarkan di provinsi masing-masing agar dapat mendorong masing-masing provinsi agar menjadi daerah yang maju di provinsi tersebut.
- 3) Kuadrat III (daerah yang dapat berkembang cepat)
- 4) Pada kuadrat III tidak terdapat daerah atau provinsi yang masuk dalam kategori kuadrat III atau daerah yang dapat berkembang cepat. Kuadrat IV (daerah relatif tertinggal) Pada kuadrat IV terdapat provinsi riau, Papua Barat, Kep. Bangka

Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Aceh. Beberapa provinsi yang terdapat di kategori IV ini berarti pemerataan pembangunan yang terjadi diprovinsi tersbut masih mengalami kendala. Hambatan aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan maupun sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi serta fasilitas umum masih belum merata.



Gambar 12. Hasil Analisis Tipologi Klassen

Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya kebijakan pemerataan pembangunan yang kuat dari pemerintah daerah, dengan cara mengarahkan investasi pemerintah maupun swasta tidak hanya kepada daerah-daerah yang maju saja serta membantu pengembangan sumber daya yang dimiliki setiap daerah tersebut

Kesimpulan

Kesimpulan

Dari penelitian mengenai analisis karakteristik kemiskinan di Indonesia dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Analisis perkembangan penduduk miskin di Indonesia tahun 2017 - 2021
Jika dilihat dari perkembangan penduduk miskin di Indonesia selama kurun waktu 5 tahun yaitu mulai dari tahun 2017 - 2021 penduduk miskin yang berada di Indonesia terus mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonominya. Jumlah

penduduk miskin yang dimiliki Indonesia dengan kemiskinan relatif terdapat di provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Gorontalo. Dan kemiskinan absolut terdapat di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat

2) Analisis karakteristik kemiskinan di Indonesia.

Analisis karakteristik kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari karakteristik kemiskinan jumlah penduduk perdesaan/perkotaan. Dimana jumlah penduduk miskin yang berada di perdesaan dengan jumlah yang tinggi dibandingkan perkotaan.

3) Analisis tingkat kedalaman kemiskinan di Indonesia.

Deskriptif tingkat kedalaman kemiskinan di Indonesia merupakan suatu kemiskinan yang dilihat dari tingkat kedalaman suatu wilayah atau daerah dengan kedalaman kemiskinan. Kedalaman kemiskinan yang ada di Indonesia terdapat di provinsi NTT, Maluku, dan Papua Barat. Provinsi tersebut memiliki jumlah tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia dibandingkan provinsi yang lainnya.

4) Analisis Tipologi Klassen.

Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dengan menggunakan indikator Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Indonesia, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut dengan klasifikasi dalam 4 kuadrat.

a) Kuadrat I :

Yaitu daerah yang maju dan tumbuh dengan pesat provinsi yang masuk dalam kategori kuadrat I adalah daerah atau provinsi yang memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi terhadap pusat pemerintah, memiliki fasilitas umum yang memadai dalam berbagai seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomiserta sarana dan prasarana dalam menunjang kelancarnya jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

b) Kuadrat II

Yaitu daerah cepat maju tapi tertekan. Provinsi yang masuk dalam kategori II ini adalah memiliki potensi yang dapat menjadi nilai tambah dalam memperoleh pendapatan per kapita wilayah dengan tingkat aksesibilitas cukup tinggi yang ditawarkan di provinsi masing-masing agar dapat mendorong masing-masing provinsi agar menjadi daerah yang maju di provinsi tersebut.

c) Kuadrat III

Yaitu daerah yang masih dapat berkembang pesat yaitu daerah yang dapat memberikan perhatian pemerintah yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi agar dapat meningkat. Sehingga pada tahap selanjutnya daerah ini masih dapat terus berkembang maju dengan mengembangkan potensi yang dimiliki dan didukung oleh peningkatan kualitas dari segala bidang dalam mencapai tujuan pembangunan yang merata.

d) Kuadrat IV

Yaitu daerah relatif tertinggal yaitu pemerataan pembangunan yang terjadi di provinsi tersebut masih mengalami kendala. Hambatan aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan maupun sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi serta fasilitas umum masih belum merata. Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya kebijakan pemerataan pembangunan yang kuat dari pemerintah daerah, dengan cara mengarahkan investasi pemerintah maupun swasta tidak hanya kepada daerah-daerah yang maju saja serta membantu pengembangan sumber daya yang dimiliki setiap daerah tersebut.

Saran

- 1) Dalam upaya mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia, pemerintah hendaknya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi sumber daya manusia maka akan mengurangi jumlah penduduk miskin dan pemerintah dapat

melakukan upaya seperti peningkatan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

- 2) Selain itu diharapkan pemerintah Indonesia dan pemerintahan daerah dapat membuka lapangan pekerjaan guna menyerap jumlah tenaga kerja sehingga masyarakat memperoleh pendapatan dan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga jumlah pengangguran semakin berkurang maka semakin rendah pula tingkat kemiskinan di Indonesia dan daerah-daerah yang ada di Indonesia pula.

Daftar Pustaka

- Arsyad. (1999). Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. BPFE.Yogyakarta.
- Al Juni, Musa. (2014). Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Indonesia. Universitas Diponegoro.
- Dumairy. (1996). Perekonomian Indonesia. Jakarta.
- Febriaty Hastina dan Nurwani. (2017). Pengaruh pendapatan perkapita, investasi, dan inflasi terhadap kemiskinan Sumatera Utara. Vol 3 No. 2.
- Jhingan, M.L. (2000). Kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah. Walam Alumni LPEM.FEUI, Vol III No.5, Juni 2002.
- Lps.mudah com/2017/D3/indikator keb. Pembangunan Ekonomi Poerwadarminta.
- Kuncoro, Mudrajad. (2000). Ekonomi pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan (1st ed.). Yogyakarta.
- Rahayu, Sri. (2003). Masalah kependudukan di Negara Indonesia. <http://library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-sri%20rahayu.pdf>.
- Solow, Robert. (1956). A contribution to the theory of economic growth. Quarterly Journal of Economics (The MIT Press), 70(1), 65-94.
- Sukirno, Sadono. (2003). Pengantar teori mikro ekonomi. Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2006). Ekonomi pembangunan: Proses, masalah, dan dasar kebijakan. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Suryana. (2000). Ekonomi pembangunan: Problematika dan pendekatan edisi pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Sangadja, Sanadjihitu Totok Wahyu. (2015). Karakteristik kemiskinan dan penanggulangannya di Kabupaten Sidoarjo. Mimbar, Volume 31, No. 2, 495-506.
- Suselo, Sei Liani, Tarsidin. (2008). Kemiskinan di Indonesia: Pengaruh pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi.
- Todaro, Michael P. (2000). (Penerjemah: Drs. Haris Munandar). Pembangunan ekonomi di dunia ketiga Edisi ketujuh. Jilid satu. Erlangga: Jakarta.
- Wongdesmiwati. (2009). Pertumbuhan ekonomi dan persentase di Indonesia. Analisis ekonometrika.